

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Kementerian Keuangan, yang bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jawa Timur (KPPN Malang D. ). Secara umum, tugas dan fungsi KPPN diatur berdasarkan PMK (PMK 262/PMK.01/206 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2016) pasal 31 yang menyatakan bahwa KPPN Tipe A1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara.

Kewenangan yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan APBN. Sejatinya KPPN merupakan wakil menteri keuangan selaku pengelola BUN yang diharuskan mampu membina satuan kerja dalam pengelolaan dana APBN di daerah. Hal ini juga termasuk ketepatan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, KPPN juga berperan penting dalam melakukan pembinaan kepada satuan kerja yang mengelola APBN melalui panduan

penggunaan aplikasi, pengetahuan terhadap peraturan yang berlaku, serta dorongan semangat kepada satuan kerja supaya efisien dan tepat waktu sehingga program-program pemerintah dapat segera direalisasikan dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia (DJPB Kemenkeu, Bangun Hubungan Harmonis dengan Satker, Kunci Kelancaran Penyaluran APBN di Daerah). Dalam hal ini berlaku juga di daerah Malang, Provinsi Jawa Timur.

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) merupakan aplikasi yang menjadi komponen terbesar dalam pengelolaan perbendaharaan negara dengan cara memfasilitasi kebutuhan proses pelayanan dari sisi penganggaran hingga proses penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Pengembangan dan implementasi SPAN menjadi salah satu bagian dari upaya pencapaian tujuan DJPB. Kebijakan-kebijakan terkait ini kemudian yang menjadi peran penting KPPN sebagai instansi vertikal DJPB guna mendukung visi dan misi tersebut. Melalui program-program yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain adalah tersedianya sistem pengendalian alokasi dan pelaksanaan anggaran yang efektif, tersedianya sistem pengelolaan kas yang terpercaya, dan terlaksananya pelayanan kepada publik yang lebih efisien.

SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN (DJPB Kemenkeu, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)). SPAN dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelaksanaan SPAN yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan. Penggunaan aplikasi SPAN mempunyai tujuan yaitu menuju Indonesia yang lebih baik.

Berdasarkan tujuan tersebut, diharapkan agar aplikasi ini dapat mampu memberikan peningkatan terhadap layanan perbendaharaan bagi masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itu, berdasarkan paparan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis hendak melakukan analisis terhadap efektivitas aplikasi SPAN dalam penyampaian informasi APBN pada satker di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, yaitu KPPN Malang. Adapun hasil dari analisis ini dituangkan ke dalam KTTA yang berjudul “Analisis Efektifitas Aplikasi SPAN dalam Penyampaian Informasi APBN di KPPN Malang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sejarah dari penggunaan aplikasi SPAN di Indonesia dan apa saja peran dari aplikasi SPAN dalam proses penyampaian informasi APBN?
2. Apa saja keterbatasan dalam penyampaian APBN di KPPN Malang?
3. Apakah aplikasi SPAN efektif dalam penyampaian informasi APBN?
4. Bagaimana dampak implementasi aplikasi SPAN terhadap kinerja KPPN Malang?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Mengetahui sejarah aplikasi SPAN di Indonesia dan peran-peran penting dari aplikasi SPAN dalam APBN.
2. Mengetahui keterbatasan dalam penyampaian APBN di KPPN Malang.

3. Mengukur efektivitas aplikasi SPAN dalam penyampaian informasi APBN.
4. Mengetahui dampak implementasi aplikasi SPAN terhadap kinerja KPPN Malang.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah penerapan aplikasi SPAN dalam penyampaian informasi APBN di KPPN Malang. Pembatasan ruang lingkup ini diterapkan untuk menjaga fokus dan relevansi pembahasan.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penulisan KTTA ini yaitu :

- a. Meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai implementasi aplikasi SPAN di KPPN Malang dan kesesuaian antara teori dan realita yang terjadi.
- b. Memberikan kontribusi kepada peningkatan pengelolaan keuangan negara.
- c. Menjadi referensi bagi penulis lain yang memiliki bahasan serupa.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penulisan KTTA ini yaitu :

##### a. Bagi penulis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman penulis tentang penyampaian informasi APBN dengan menggunakan aplikasi SPAN berdasarkan hal yang terjadi di lapangan dalam hal ini KPPN Malang.

b. Bagi pembaca

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang penyampaian informasi APBN dengan menggunakan aplikasi SPAN.

c. Bagi pendidik dan calon pendidik

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pendidik dan calon pendidik tentang penyampaian informasi APBN dengan menggunakan aplikasi SPAN.

d. Bagi KPPN Malang

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi apabila pihak KPPN ingin melakukan evaluasi terkait penggunaan aplikasi SPAN sehingga dapat meningkatkan pelayanan.

e. Bagi PKN STAN

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak PKN STAN dalam penyelenggaraan pendidikan keuangan negara.

f. Bagi penulis lain

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penulisan penelitian serupa

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisi gambaran umum tentang KTTA. Dalam bab I, penulis menjelaskan latar belakang pengambilan judul, tujuan pembuatan karya tulis, ruang lingkup pembahasan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun KTTA.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi gambaran objek serta teori yang digunakan dalam penulisan KTTA. Penulis akan menyajikan beberapa landasan antara lain landasan teoritis, landasan yuridis, landasan empiris, serta hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Teori yang dibahas berupa pedoman penggunaan aplikasi SPAN, teori efektivitas, dan teori efisiensi. Penulis berpedoman pada peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan praktik APBN melalui aplikasi SPAN.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III berisi uraian yang menyajikan data mengenai pelaksanaan APBN melalui aplikasi SPAN. Selain itu, penulis juga menjelaskan gambaran objek yang dibahas meliputi profil, sejarah, visi, misi, serta struktur organisasi KPPN Malang. Penulis juga akan menyajikan analisis atas efektivitas aplikasi SPAN dalam proses penyampaian informasi APBN di KPPN Malang.

## BAB IV SIMPULAN

Bab IV berisi simpulan dari penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan jawaban atas rumusan masalah yang disampaikan di atas.